

ABSTRAK

Mabruk Salim Brik Bajri: Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji (Studi Pada Program Insentif Guru Ngaji Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)

Kesejahteraan merupakan tugas bersama untuk terjadinya kemakmuran didalam lingkungan masyarakat, di mulai dari pemerintah desa yang beririsan langsung dengan masyarakat, guru ngaji yang notabene ujung tombak membentuk murid yang agamis, walau pengabdian yang sudah lama kadang kita tidak pernah melirik bahkan memandang sebelah mata profesi yang mana membawa kemajuan keagamaan suatu wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dinamika, tindakan, dan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan guru ngaji yang mana terdapat dalam program insentif guru ngaji.

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Soekanto dimana peran adalah bagian yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh suatu orang atau lembaga yang menempati jabatan atau posisi yang tinggi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara langsung dengan informan dan mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji pada program insentif guru ngaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pada tahapan pelaksanaan program kesejahteraan guru ngaji di pemerintah desa Cibiru Hilir, terdapat dinamika yang berkembang di lapangan. Adanya program serupa di tingkat pemerintah daerah menyebabkan penekanan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan beberapa guru ngaji tidak memenuhi persyaratan formal dan tidak dapat memanfaatkan program insentif dari pemerintah daerah. Kedua, Tindakan pemerintah desa terhadap guru ngaji sangat baik dan berkelanjutan. Program insentif guru ngaji di pemerintah desa terus membuka pendaftaran dan pihak desa secara aktif terlibat. Meskipun guru ngaji yang tidak lolos verifikasi pemerintah daerah, mereka masih mendapatkan insentif dari pemerintah desa. Ketiga, Dalam kebijakan Kepala Desa terkait program insentif guru ngaji, tidak terdapat aturan yang jelas dalam peraturan desa sebagai dasar hukum. Penentuan penerima insentif hanya dilakukan melalui Surat Keputusan tanpa aturan yang pasti. Pelaksanaan program ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa tanpa pemotongan apapun.

Kata kunci : Pemerintah desa, Kesejahteraan, Guru Ngaji